PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2591K/PID.SUS./2011)

Dea Kusuma Wardani, Widodo Tresno Novianto
E0012098

kencanakusumawardani@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2011 adalah cacat hukum karena terjadi pertentangan dalam ketentuan Pasal 18 undang-undang Pemberantasan Korupsi dengan Pasal 14a KUHP apabila uang pengganti tidak terbayarkan.

Kata Kunci : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pidana bersyarat, korupsi, pertimbangan hakim

Abstract

This study aims to determine the settings of probation in corruption cases under Act No. 20 of 2001 on the Amendment of Act No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption and its application through the consideration of judges in Supreme Court Decision No. 2591K/Pid .Sus / 2011. This study uses normative law research and technical prescriptive or applied. The research approach in the form of law approach and the approach case study data type is secondary data with primary legal materials and secondary law. Data collection techniques in the form of a literature study and data analysis technique used is the syllogism deduction method. Based on the results of this study concluded that the criminal conditional not regulated in Law Number 20 of 2001 on the Amendment of Act No. 31 of 1999 on Corruption Eradication. Supreme Court Decision No. 2591K / Pid.Sus / 2011 was legally flawed because of conflicts within the provisions of Article 18 legislation Corruption with Article 14a Penal Code if the compensation is not paid.

Keyword: law on the eradication of criminal acts of corruption, probation, corruption, judge consideration

A. Pendahuluan

Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak hanya menimbulkan permasalahan ekonomi tetapi juga meningkatkan gejala kriminalitas sebagai suatu dimensi baru kejahatan yang melibatkan suatu penyalahgunaan secara melawan hukum dari kekuasaan ekonomi (*illegal abuse of economic power*) maupun kekuasaan umum (*illegal abuse of public power*) yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau suatu tindak pidana korupsi (Hermin, 1994:32). Tindak pidana korupsi telah menjadi salah satu permasalahan terbesar bangsa Indonesia saat ini dimana perkembangan praktek korupsi semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya praktek korupsi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan indeks korupsi yang tinggi baik di tingkat asia maupun dunia. Predikat buruk serta tidak adanya kesungguhan aksi dalam pemberantasan korupsi telah menempatkan Indonesia sebagai negara

terkorup dari 133 negara di dunia dan menjadi posisi kedua setelah Vietnam menurut hasil riset *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) (Junaidi Soewartojo, 1987:25).

Penegakan hukum terhadap korupsi sebagai *extra ordinary crime* merupakan faktor penting dalam usaha penanggulangan dan pencegahan korupsi. Harus diakui bahwa pemberantasan korupsi lebih fokus terhadap tindakan represif (penindakan) karena korupsi merupakan masalah besar sehingga usaha penanggulangannya sangat di prioritaskan. Negara dalam hal ini bertindak selaku penguasa dan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi pidana mendelegasikan wewenangnya kepada hakim dalam rangka melaksanakan penegakan hukum (E. Utrecht, 1987:178). Hakim sebagai penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menentukan jenis pidana sesuai dengan kehendaknya. Sepanjang tahun 2015 hakim menjatuhkan vonis rata-rata 2 tahun 2 bulan penjara dan masih berpeluang untuk mendapatkan remisi atau pembebasan beryarat, bahkan hakim juga menjatuhkan pidana bersyarat terhadap 13 terdakwa (Tama S. Langkun dkk, 2014:16). Penjatuhan pidana bersyarat oleh Mahkamah Agung terhadap terdakwa Mardjino seolah-olah telah menjadi yurisprudensi bagi hakim. Vonis hakim yang demikian itu memberikan kesan kepada masyarakat bahwa koruptor hanya dijatuhi pidana ringan.

Pidana yang dianggap ringan terhadap korupstor juga dijatuhkan Majelis Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 2591K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan terdakwa dr. Taufiqurrahman Hamdie, M.Kes telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi klaim dana ASKES secara bersama-sama dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1736 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askes Sosial dan Askes Komersial sehingga ditemukan kerugian negara sebesar Rp.13.295.251,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah). Terhadap perbuatannya tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 UUPTPK dengan ancaman minimal 1 (satu) tahun penjara dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan vonis hanya 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan 4 (empat) bulan serta memberikan pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UUPTPK.

Hakim dalam menentukan hukuman kepada terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2011 mempertimbangkan jumlah kerugian negara yang telah dibagi-bagikan kepada beberapa karyawan dan pegawai honorer (5 orang) tersebut sebagai tindak pidana yang sifatnya ringan, padahal tindak pidana korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime* karena korupsi telah menjadi kultur pada berbagai level birokrasi dan kehidupan masyarakat (Andi Hamzah, 2004:7). Pidana 2 bulan penjara tersebut telah melanggar batas minimum khusus Pasal 3 UUPTPK yaitu 1 tahun, sedangkan pidana bersyarat tidaklah diatur dalam UUPTPK melainkan diatur dalam Pasal 14a – 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengingat UUPTPK merupakan aturan pidana yang bersifat khusus dan KUHP merupakan aturan yang bersifat umum, maka berlakulah asas *lex specialist derogat legi generalis* yang artinya ketentuan khusus dapat mengesampingkan ketentuan umum, sehingga ketentuan dalam UUPTPK dapat mengesampingkan ketentuan KUHP.

Melalui pengkajian terhadap penerapan pidana bersyarat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2011 maka dapat dimungkinkan digunakan baik oleh para pembentuk undang-undang (*legislative*) menjadi salah satu acuan dalam pembaharuan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih baik agar tercipta suatu kepastian hukum dan menjadi salah satu acuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa tindak pidana korupsi agar memiliki pendapat yang sama mengenai penerapan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga tidak akan menimbulkan disparitas putusan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji oleh penulis adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi serta penerapan pidana bersyarat yang ditinjau dari perspektif UUPTPK.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu melakukan penelaahan mengenai pidana bersyarat terhadap UUPTPK dengan KUHP dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah kasus tindak pidana korupsi dana klaim ASKES dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2011. Jenis data yang digunakan

adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.

C. Pidana Bersyarat dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Sebelum penulis mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana berdasar terhadap pelaku tindak pidana korupsi maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai duduk perkara Putusan Nomor 2591K/Pid.Sus/2011:

Terdakwa Dr. Taufiqurahman Hamdie, M.Kes sejak bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 diangkat sebagai Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin berdasarkan Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 008 Tahun 2007 tertanggal 23 Juli 2007. Sebagai Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin maka terdakwa mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin semua pelayanan Rumah Sakit termasuk juga kegiatan ASKES dan mempertanggungjawabkan semua hasil kerja kepada Bupati sebagai atasan langsung. Selain itu, terdakwa juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, mengendalikan, dan bertanggungjawab terhadap kegiatan ASKES baik dari sisi pelayanan maupun kerjasama dengan pihak PT. ASKES serta penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber pada klaim PT. ASKES. Tanggal 23 Juli 2007, terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pleihari telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pleihari Nomor : 1736 tahun 2007 pada tanggal 14 Oktober 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan ASKESKIN pada RSUD Hadji Boejasin.

Selama periode bulan Agustus 2007 sampai bulan Desember 2007 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah memperoleh pendapatan yang berasal dari klaim PT. ASKES khususnya untuk Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih Rp.190.918.227,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Berdasarkan klaim PT. ASKES khususnya untuk Jasa Pelayanan periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 maka RSUD Hadji Boejasin mendapatkan penerimaan kurang lebih Rp.99.107.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu rupiah), sedangkan penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber kalim PT. ASKES baik dari Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) ASKES dana dari Jasa Pelayanan periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih sebesar Rp.290.025.227,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Seluruh uang penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang berjumlah kurang lebih Rp.290.025.227,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut kemudian digunakan langsung untuk dibagi-bagikan kepada seluruh karyawan RSUD Hadji Boejasin dan ada juga yang digunakan untuk membeli Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP).

Beberapa pertimbangan majelis hakim Mahakamah Agung dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Taufiqurahman Hamdie, M.Kes adalah sebagai berikut:

- a) tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari tanggal 13 Juli 2011;
- b) putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 60/Pid.Sus/2011PN.Plh. tanggal 22 Juli 2011 dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 10/Pid.Sus/2011/PT.BJM. tanggal 22 September 2011;
- c) Pengajuan permohonan kasasi oleh Terdakwa melalui kuasa hukumnya di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 Oktober 2011, Nomor 60/Akta Pid/2011/PN.Plh;
- d) Memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tanggal 3 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 7 November 2011, berisi alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Tentang terpenuhinya unsur barangsiapa hanya karena Terdakwa memiliki identitas yang lengkap;
 - 2) Putusan *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Banjarmasin Reg. No. 10/Pid.Sus/2011/PT.Bjm) telah salah dan/atau keliru dalam hal putusan tidak berdasar pada hukum, yang mana putusan tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan yang dilihat dari fakta yang mendukung atas aturan hukum yang berlaku dan dalam hal putusan tidak berdasar pada hukum karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya pada penerapan pertimbangan

- hukum sama sekali tidak menunjukkan penerapan Hukum Acara Pidana yang sebenarnya. Pertimbangan hukum yang dibuat sangat tidak teliti dalam mengungkapkan fakta-fakta hukum dengan tidak memperhatikan sama sekali dengan perkara lain berkas terpisah khususnya menyangkut perkara RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, sehingga mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana serta merta telah melampaui batas kewenangannya;
- e) Menimbang, memori kasasi tanggal 4 November 2011 oleh kuasa Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2010 yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 7 November 2011 yang berisi alasan-alasan pengajuan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- 1) Penerapan ketentuan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat ditunjukkan kepada Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2007 sebab sesuai kajian aspek teori perundang-undangan PP No. 58 Tahun 2005 tentang jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 berlaku efektif paling lambat untuk Anggaran 2009;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari merupakan salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga menurut ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 328 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BLUD RSUD Hadji Boejasin dapat menggunakan secara langsung dana pemasukan yang diterimanya. Oleh karena itu seyogyanya pengelolaan keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagai BLUD tunduk pada ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Layanan Umum, mengacu pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo Pasal 328 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Terdakwa dr. Taufiqurahman Hamdie, M.Kes tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005;
 - 3) Bahwa Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin mempunyai tujuan agar kepentingan negara / kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- f) Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- 1) Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:
 - (a) Bahwa Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin pada tanggal 14 Oktober 2007 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1736 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tekhnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askes Sosial dan Askes Komersial telah melanggar Perda Nomor 16 Tahun 2006 sehingga terjadi selisih dalam Pendapatan Kas Daerah yang seharusnya sebesar 80% disetor ke Kas Daerah dan 20% untuk jasa pelayanan;
 - (b) Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 13.295.251,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dengan perhitungan 40% disetor untuk Kas Daerah dan 60% dibagikan untuk jasa pelayanan sehingga selisih kekurangan untuk Kas Daerah sebesar 40% dan kelebihan untuk jasa pelayanan sebesar 40%;
 - (c) Bahwa dari kelebihan jasa pelayanan sebesar 40% jumlahnya Rp.13.295.251,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) telah dibagi-bagikan oleh Terdakwa kepada beberapa karyawan maupun sebagai tenaga honorer;
 - (d) Bahwa tindakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair, namun merupakan tindak pidana sedemikian ringan sifatnya yaitu uang sebesar Rp. 13. 295.251,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sebagai kerugian negara tetapi telah dibagikan kepada karyaeen dan pegawai honorer (5 orang) karenanya perlu untuk mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
 - g) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , putusan *Judex Factie* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

- h) Menimbang, membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini karena permohonan kasasi ditolak;
- i) Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UUPTPK, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memberikan kemudahan bagi hakim untuk menetapkan pемidanaannya, setelah terbukti bahwa apa yang dituduhkan terhadap tertuduh telah terbukti. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 harus terkait dengan hukum yang berlaku sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Terdakwa dan hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UUPTPK. Unsur dari Pasal 3 UUPTPK yaitu:

- a) Dilakukan oleh setiap orang;
- b) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana (secara melawan hukum);
- c) Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut karena jabatan atau kedudukannya;
- d) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- e) Dapat;
- f) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penerapan UUPTPK ini sesuai dengan asas **lex specialis derogat legi generali** yang bermakna bahwa aturan hukum yang khusus (*lex specialis*) mengesampingkan aturan hukum yang umum (*lex generalis*), dimana tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur secara khusus di dalam UUPTPK sehingga mengesampingkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan hukum yang umum (*lex generalis*). Sehingga, hakim seharusnya mematuhi ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 3 UUPTPK dan tidak seharusnya hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa.

Pidana pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana” (Muladi, 1992: 195-196). Pidana bersyarat diatur di dalam Buku I tentang Aturan Umum Pasal 14a - 14f KUHP dengan segala peraturan pelaksanaannya sedangkan UUPTPK tidak mengaturnya. Meskipun terdapat asas *lex specialis derogat lex generalis* pidana bersyarat tetap bisa berlaku. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung Republik Indonesia diperoleh data bahwa ternyata hakim juga mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa di dalam putusannya. Terkait dengan pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi, terdapat argumentasi dari hakim yang mengatakan bahwa terhadap pelaku dengan kerugian negara yang ditimbulkan sangat kecil, misalnya berkisar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan itupun telah dikembalikan ke negara, tidak selayaknya pelaku tindak pidana korupsi tersebut dijatuhi pidana yang berat, dengan kata lain, hakim menganggap tidaklah adil apabila terhadap pelaku yang

demikian dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana bersyarat memperhatikan keadilan bagi terdakwa, karena itulah menjadi sangat penting juga di dalam pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung untuk mengemukakan hal-hal yang disebut di dalam Pasal 197 KUHP yaitu mengenai hal-hal yang dapat memberatkan khususnya hal-hal yang dapat meringankan bagi terdakwa, seperti kerugian negara yang telah dikembalikan, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu, selama ini dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana bersyarat yang sering digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah faktor non-yuridis.

Pasal 14a KUHP menyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Muladi, 1992 : 6-7):

1. Pidana bersyarat dijatuhkan dalam putusan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi 1 (satu) tahun. Jadi pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Penentuan penerapan pidana bersyarat ini tidak didasarkan pada besarnya ancaman pidana perbuatan tersebut tetapi didasarkan pada pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan yang tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Tidak ada pembatasan mengenai pidana kurungan ini karena maksimum dari pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun.
3. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan menyangkut pidana denda dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda benar-benar akan dirasakan berat bagi si terdakwa.

Merujuk pada Pasal 14a KUHP tersebut, maka dimungkinkan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat apabila hakim menjatuhkan pidana maksimal 1 (satu) tahun penjara. Terhadap pendapat tersebut, penulis kurang sependapat karena tidak semua pasal dalam UUPTPK mempunyai ancaman pidana minimal 1 (satu) tahun penjara dapat diterapkan pidana bersyarat, sebab dalam UUPTPK mengatur adanya penggabungan (kumulasi) antara pidana pokok berupa pidana penjara dengan pidana pokok lainnya berupa denda yang erat kaitannya dengan pidana kurungan pengganti (vide Pasal 30 ayat (2) KUHP), sementara dalam Pasal 14a ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengatur bahwa penerapan pidana bersyarat dikecualikan terhadap pidana kurungan pengganti dan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP. Hakim memang dimungkinkan menjatuhkan pidana bersyarat jika melihat ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP, namun dengan ketentuan “**tidak termasuk kurungan pengganti**” dalam hal ini berkaitan dengan kumulasi penjatuhan pidana penjara dengan pidana denda. Adanya kumulasi penjatuhan pidana akan mempersulit hakim untuk menjatuhkan putusan tidak usah menjalani penjara, namun sanksi denda tidak akan terbayarkan dan pidana kurungan harus dijalani oleh terpidana, hal ini menjadi kontra produktif karena dengan tidak terbayarnya denda maka terdakwa secara langsung telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan konsekuensi pidana kurungan pengganti, selain itu kurungan pengganti tidak dapat dikategorikan sebagai syarat terdakwa tidak menjalani penjara, karena kurungan pengganti yang berkaitan dengan denda merupakan hukuman yang sifatnya mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a angka 4 (empat) selain pidana penjara yang diatur dalam Pasal 10 angka 2 KHUP. Jadi, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana bersyarat apabila suatu ketentuan mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda maupun hukuman pidana lain yang sifatnya mandiri. Selain itu, Pasal 14a dalam KUHP merupakan ketentuan yang dimuat dalam buku 1 yang merupakan ketentuan umum, sehingga walaupun terdapat asas *lex specialis derogat lex generalis* pidana bersyarat tetap bisa berlaku. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa terdakwa Taufiqurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 UUPTPK. Ancaman hukuman dalam Pasal 3 UUPTPK bersifat kumulasi alternatif antara pidana penjara dengan pidana denda sehingga dapat memberikan peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP, namun ditambah ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UUPTPK. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pasal 14a KUHP tidak dapat menjatuhkan pidana bersyarat pada saat menjatuhkan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun meskipun tanpa diakumulasikan dengan pidana denda karena meskipun Pasal 18 UUPTPK tersebut merupakan pidana tambahan yang menurut asasnya tidak menjadi pidana pokok sebagaimana Pasal 10 KUHP. Pidana denda dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) memiliki pengertian yang berbeda dengan pidana denda yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, karena pidana denda dalam KUHP tidak disubsidairkan dengan

pidana pengganti, sedangkan pidana tambahan dalam Pasal 18 UUPTPK tersebut disubsidairkan dengan pidana pengganti. Pasal 18 ayat (2) hanya mengatur mengenai tata cara apabila uang pengganti tidak terbayarkan sedangkan Pasal 18 ayat (3) sifatnya mewajibkan adanya pidana penjara apabila uang pengganti tidak terbayarkan berdasarkan putusan hakim yaitu pada kalimat “... maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya”.

Penerapan Pasal 18 ayat (3) UUPTPK ini berlaku untuk tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan adanya unsur kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK. Pasal 3 UUPTPK mencantumkan kata “**dapat**” sehingga sifatnya dari kerugian keuangan negara adalah tidak absolut, sehingga subyek hukum tetap dapat dipidana meskipun kerugian keuangan negara secara riil belum keluar. Unsur kerugian negara dalam Pasal 3 UUPTPK dibuktikan dengan adanya unsur “**memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain maupun suatu korporasi**” yang memiliki makna apa yang diperkaya dan diuntungkan adalah berkaitan dengan kerugian negara yang dilakukan secara melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang.

Jadi dengan dasar tersebut, meskipun ancaman pidana dalam Pasal 3 UUPTPK berifat kumulasi-alternatif, yang menurut Pasal 14a KUHP saat diterapkan pada saat hakim menjatuhkan putusan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun, namun terhadap Pasal 3 UUPTPK tersebut terjadinya kerugian keuangan negara wajib ditambahkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPTPK. Kewajiban penambahan Pasal 18 ayat (3) tersebut akan mengakibatkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP yang mensyaratkan syarat umum melalui putusan hakim, sedangkan pidana pengganti juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum pada saat uang pengganti tidak terbayarkan sehingga penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 atas nama Terdakwa Taufiqurrahman pada tingkat kasasi adalah cacat hukum dan bertentangan dengan Pasal 14a – 14f KUHP.

Penjatuhan pidana bersyarat masih menjadi kontroversial sampai saat ini. Beberapa pendapat yang melegalkan penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi muncul dari kalangan ahli hukum pidana dan pendapat dari hakim baik di tingkat pengadilan negeri maupun hingga tingkat Mahkamah Agung. Indriyanto Seno Adji juga mengemukakan pendapat yang sama, yaitu:

“Penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan undang-undang, karena hakim memiliki kebijakan penjatuhan pidana minimal dan maksimal, hakim juga memiliki kebebasan kebijakana pemidanaan. Berlakunya pidana bersyarat (dengan tetap adanya pidana tambahan) bukan sekedar efek jera. Penerapan efek jera ternyata tidak menghapuskan korupsi, tetapi membuat korupsi menjadi sistemik dan meluas. Dasar hukum penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena pidana bersyarat (sebagai asas pidana pokok) tidak dilarang dalam undang-undang tindak pidana korupsi”.

Terhadap pendapat tersebut diatas, penulis kurang sependapat karena dalam UUPTPK tidak mengenal adanya pidana bersyarat. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengenal pidana mati, penjara, denda dan pidana tambahan. Selain itu, sebagai undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), UUPTPK menentukan batas ancaman minimal dan maksimal pemidanaan, sehingga rasanya kurang tepat apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Ancaman minimal yang ada dalam UUPTPK bertujuan agar hakim tidak menjatuhkan pidana seringannya kepada terdakwa.

Mengutip pembahasan permasalahan pertama, Pasal 14a dalam KUHP merupakan ketentuan yang dimuat dalam buku I yang merupakan aturan umum, sehingga walaupun terdapat *asas lex specialis derogat lex generalis* pidana bersyarat tetap bisa berlaku. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan:

“Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang terdapat syarat minimal, tetapi dalam undang-undang tersebut juga tidak ada larangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Aturan pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 KUHP tersebut bersifat umum, oleh karena dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur tentang pidana bersyarat, tapi karena aturan dalam Pasal 14 KUHP, maka aturan tersebut yang digunakan dalam kasus-kasus tertentu yang ancaman minimalnya dalam undang-undang adalah 1 (satu) tahun. Bahkan Bagirmanan selaku ketua Mahkamah Agung menghimbau kepada seluruh jajaran hakim agar terhadap kasus-kasus yang nilainya dibawah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian

terdakwa tidak menikmati hasil korupsi tersebut dan telah mengembalikan nilai korupsi yang ada, serta dampak dari korupsi tersebut tidak merugikan masyarakat, maka terhadap perkara-perkara tersebut jangan menerapkan undang-undang tindak pidana korupsi secara normatif.

Mengutip pembahasan permasalahan pertama, pidana bersyarat memang dapat diterapkan oleh hakim dengan dasar hukum Pasal 14a KUHP, namun kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila hakim tidak memberikan ketentuan adanya pidana kurungan pengganti. Sehingga tidak serta merta vonis pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat dibenarkan karena apabila ketentuan dalam Pasal 14a dan UUPTK saling bertentangan maka putusan tersebut dapat cacat hukum atau batal demi hukum.

Pidana bersyarat sendiri biasanya hanya dijatuhkan untuk perkara-perkara yang sifatnya ringan. Oleh karena itu rasanya tidak adil apabila kasus tindak pidana korupsi disamakan dengan kasus pencurian yang dijatuhi hukuman badan berupa penjara sedangkan kasus tindak pidana korupsi hanya dijatuhi pidana bersyarat. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Djoko Sarwoko selaku Ketua Muda Tindak Pidana Khusus pada Mahkamah Agung periode 2009-2014 yang menyatakan:

“Tidaklah adil, jika kita membandingkan suatu perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian negaranya kecil dengan kasus pencurian ayam atau pencurian sandal jepit, dimana kasus pencurian tersebut dijatuhi hukuman badan berupa pidana penjara sedangkan para koruptor hanya dihukum dengan percobaan atau pidana bersyarat. Oleh karena itu, saya selaku ketua kamar pidana pada Mahkamah Agung, mengadakan rapat pleno dengan para hakim pidana umum dan pidana khusus termasuk juga hakim ad hoc, dan dalam rapat tersebut kami telah membuat kesepakatan, bahwa setelah ini tidak boleh ada lagi putusan berupa pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi dan tidak ada lagi putusan di bawah ancaman minimal dalam tindak pidana korupsi. Hasil rapat akan pleno yang akan berwujud buku pedoman bagi para hakim tersebut, akan mengikat seluruh hakim tipikor pada umumnya, dan hakim pada kamar pidana pada khususnya dengan tujuan agar Mahkamah Agung ini menjadi satu, sehingga diharapkan jangan muncul lagi putusan yang macam-macam, misalnya ada yang menyatakan boleh menjatuhkan pidana bersyarat dan ada juga yang menyatakan tidak boleh menjatuhkan hukuman percobaan dalam perkara tindak pidana korupsi.”

Apabila para penegak hukum melunak terhadap para koruptor, maka hal tersebut akan memupuk tindak pidana korupsi di Indonesia. Penulis berpendapat ditentukannya ancaman minimal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku serta agar masyarakat takut untuk melakukan korupsi. Hal tersebut diatas sesuai dengan teori pencegahan (*deterrence*) dimana penjatuhan hukuman kepada pelaku dapat mencegah terjadinya kejahatan lainnya. Cara pencegahan yang dapat dilakukan antara lain dengan pencegahan yang bersifat umum dan khusus. Pencegahan umum (*algemene preventietheorieen*) merupakan pencegahan dimana penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ketika orang lain tahu bahwa orang yang melakukan kejahatan telah dihukum, maka mereka yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan mungkin akan cenderung takut. Pencegahan yang selanjutnya adalah pencegahan khusus (*bijzondere preventie theorieen*) yang bertujuan untuk memberikan efek jera dengan cara memperbaiki dan membuat penjahatnya tidak mampu lagi melakukan kejahatan. Pengalaman telah dijatuhi hukuman mempengaruhi pelaku kejahatan sedemikian rupa sehingga ia takut untuk mengulangi kejahatannya di masa yang akan datang (Tina Asmarawati, 2015:48-49).

Penjatuhan pidana bersyarat juga tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam undang-undang tipikor. Tujuan pemidanaan dalam UUPTK adalah untuk memberikan efek jera bagi para koruptor sebagaimana tertuang dalam penjelasan undang-undang tersebut, yaitu:

“Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana. Selain itu, undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara”.

Pidana bersyarat sendiri memberikan kesan kurang beratnya penjatuhan pidana terhadap para koruptor, sehingga menimbulkan ketidaktakutan akan ancaman pidana dalam UUPTK. Ditinjau dari teori pencegahan, maka pemidanaan tindak pidana korupsi telah kehilangan fungsi pencegahan umumnya, karena meskipun telah banyak koruptor yang dijatuhi pidana masih banyak orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Pencegahan khusus berupa efek jera yang diharapkan muncul

dari pemidanaan koruptor pun dikhawatirkan akan hilang bersamaan dengan diterapkannya pidana bersyarat yang artinya meskipun terdakwa terbukti bersalah, ia tidak perlu menjalankan hukuman selama tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.

Penjatuhan pidana bersyarat dianggap sebagai terobosan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, karena dengan dijatuhkannya pidana bersyarat maka terdakwa tidak perlu menjalani pidananya sehingga dapat mencegah timbulnya efek-efek negatif pemidanaan penjara seperti adanya labelling terhadap mantan narapidana setelah keluar dari penjara. Hal tersebut akan menyulitkan bagi mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Selain itu, interaksi antara para narapidana dalam satu sel dapat menimbulkan konflik maupun menjadi faktor kriminogen narapidana lain untuk melakukan kejahatan, sehingga bagi para narapidana yang belum jera akan melakukan kejahatan lagi setelah keluar dari penjara. Tidak dijalankannya hukuman penjara bagi terdakwa juga dapat mengurangi jumlah narapidana di penjara sehingga mengurangi beban negara untuk membiayai lembaga pemasyarakatan. Namun, penulis berpendapat bahwa pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi bukan merupakan terobosan hukum melainkan suatu penerobosan hukum oleh hakim. Penjatuhan pidana bersyarat mungkin memberikan rasa keadilan bagi para koruptor dengan kerugian negara yang nilainya sedikit, namun tidaklah memberikan keadilan di dalam masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Simpulan

Dasar hukum pertimbangan hakim menjatuhkan pidana bersyarat adalah Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) (2) dan (3) UUPTPK dan keyakinan hakim yaitu kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi terdakwa hanya sedikit sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sifatnya ringan.

Ditinjau dari perspektif UUPTPK, tidak ada pengaturan pidana bersyarat dalam UUPTPK sehingga meskipun terdapat ketentuan asas *lex specialist derogat legi generali* hakim memiliki peluang menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi karena menurut Pasal 103 KUHP pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a – 14f KUHP dalam Buku I tentang Aturan Umum juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

E. Persantunan

Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi), seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta semua pihak yang telah membantu.

F. Daftar Pustaka

- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Utrecht. 1987. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tintamas.
- Evi Hartanti. 2014. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermin. 1994. *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi: Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Junaidi Soewartojo. 1987. *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Jur Andi Hamzah. 2005. *"Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional"*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tama S. Langkun dkk. 2014. *Studi atas Disparitas Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Deepublisher.
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.